

sistem satu partai atau partai tunggal dalam bidang pemerintahan. Oleh karena itu, semua partai politik termasuk AFPFL dihilangkan. Ne Win menganggap bahwa banyaknya partai politik akan mengacaukan pemerintahan karena partai politik cenderung untuk memperebutkan kekuasaan. Walaupun AFPFL hanya bertahan sampai tahun 1962, namun perjuangan AFPFL dalam mencapai kemerdekaan di Burma mempunyai catatan tersendiri dalam sejarah Burma karena AFPFL merupakan organisasi yang penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Burma.

BAB V

Kesimpulan

Kolonialisme Inggris (1886-1942) di Burma berdampak pada munculnya pergerakan nasional. Pada awalnya, pergerakan nasional dipelopori oleh golongan *pongyi* (biksu Budha) yang merasa bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Inggris menjadikan posisi para *pongyis* terpinggirkan dalam masyarakat Burma. Para *pongyis* kemudian mendirikan organisasi *Young Men's Buddhist Association* (YMBA) yang bertujuan untuk mengembalikan kedudukan biksu pada masyarakat Burma. Tak dapat dipungkiri bahwa kolonialisme Inggris telah menumbuhkan bibit nasionalisme bagi masyarakat Burma.

Pada masa pendudukan Jepang di Burma (1942-1945) pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan semakin berkembang. Dampak dari pendudukan

Jepang di Burma memunculkan organisasi perlawanan terhadap fasis Jepang. Organisasi tersebut yaitu *Anti-Fascist People Freedom League* (AFPFL). Organisasi ini bertujuan untuk melawan pemerintahan fasis Jepang di Burma dan memperjuangkan kemerdekaan Burma.

Latar belakang pembentukan AFPFL yaitu karena kaum nasionalis di Burma merasa kemerdekaan yang diberikan Jepang untuk Burma pada tanggal 1 Agustus 1943 merupakan kemerdekaan semu. Hal ini terlihat dari intervensi atau campur tangan yang kuat dari Jepang dalam segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan Burma. Sebagai contoh, setiap keputusan yang diambil menyangkut urusan kenegaraan Burma harus diketahui oleh Jepang. Selain itu, penderitaan rakyat Burma akibat dari eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh Jepang juga menjadi penyebab kaum nasionalis menjadi antipati terhadap Jepang. Eksploitasi ini terkait dengan kepentingan Jepang dalam Perang Dunia II. Setiap kemampuan di bidang ekonomi harus dipusatkan untuk menunjang perang (*War Economy*). Bahan makanan seperti beras, minyak, hasil perkebunan, hasil perikanan dipasok untuk memenuhi kebutuhan pangan tentara Jepang. Hal inilah yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat Burma. Ditambah lagi dengan sikap dan perilaku tentara Jepang yang tidak menghormati agama Budha yang merupakan agama mayoritas di Burma. Penghinaan terhadap agama Budha terlihat dari perilaku tentara Jepang yang menggunakan bangunan suci Budha untuk digunakan sebagai tempat mandi, cuci, dan kakus. Mereka juga merusak gambar-gambar Budha dan gulungan suci biara. Alasan-alasan inilah yang membuat

kaum nasionalis untuk membuat organisasi perlawanan terhadap pemerintahan pendudukan Jepang.

Perjuangan AFPFL dimulai dari rencana untuk mengalahkan dan mengusir Jepang dari wilayah Burma. Untuk dapat mengusir Jepang dari wilayah Burma, AFPFL bekerja sama dengan pemerintahan Inggris yang berada di Simla, India. Inggris memberikan bantuan militer berupa persenjataan dan ketentaraan. Tentara Inggris yang membantu AFPFL dalam menyerang Jepang yaitu Force 136 dan *British 14th Army*. Melalui perencanaan yang matang, akhirnya AFPFL, Force 136, dan *British 14th Army* berhasil mengalahkan Jepang dan mengusir Jepang dari wilayah Burma. Jepang tidak hanya mengalami kekalahan pada peperangan di Burma saja, dalam Perang Dunia II pun Jepang mengalami kekalahan. Akibat dari kekalahan tersebut, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 2 September 1945 dalam perjanjian diatas kapal perang milik Angkatan Laut Amerika Serikat, *Missouri*, di Teluk Tokyo. Dalam perjanjian tersebut diputuskan bahwa negara-negara bekas pendudukan Jepang di Asia Tenggara berada di bawah pengawasan Sekutu. Dalam perjanjian di atas kapal tersebut juga dibahas mengenai dekolonisasi yang akan dilakukan oleh Sekutu pada negara-negara bekas pendudukan Jepang. Ditetapkan bahwa Inggris yang kemudian melakukan dekolonisasi di Burma.

Setelah Jepang berhasil dikalahkan, perjuangan AFPFL untuk mencapai kemerdekaan tidak berhenti begitu saja. Perjuangan masih terus dilakukan dengan cara melakukan serangkaian perundingan dengan Inggris. Selain mengadakan

perundingan dengan Inggris, AFPFL juga melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi dengan etnis-etnis minoritas seperti Karen, Shan, Kachin, Chin untuk mendukung AFPFL memperjuangkan kemerdekaan dan membentuk *Union of Burma*.

Pada tanggal 12 Februari 1947 terjadi kesepakatan antara AFPFL dengan wakil dari etnis Karen, Chin, dan Shan di kota Panglong. Kesepakatan tersebut dikenal dengan nama Perjanjian Panglong. Dalam Perjanjian Panglong disepakati bahwa bahwa para pemimpin etnis perbatasan bersedia berada dalam kesatuan pemerintah Burma (*Union of Burma*) yang merdeka. Mereka juga akan mendukung AFPFL dalam memperjuangkan kemerdekaan Burma. Lalu dalam sepuluh tahun kedepan etnis-etnis akan memperoleh otonomi penuh untuk mengatur wilayahnya sendiri dalam negara kesatuan Burma.

Melalui proses perundingan yang dilakukan secara damai antara AFPFL dengan Inggris, akhirnya Burma memperoleh kemerdekaan pada tanggal 4 Januari 1948. U Nu terpilih sebagai Perdana Menteri *Union of Burma* sedangkan yang menjabat sebagai presiden adalah Sao Shwe Thaik, yang berasal dari etnis Shan. Dengan merdekanya Burma, maka tujuan AFPFL yaitu memperjuangkan kemerdekaan Burma telah tercapai. AFPFL itu sendiri merupakan organisasi yang penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Burma. AFPFL mampu untuk menyatukan beragam etnis yang ada di Burma untuk mendukung upaya memperjuangkan kemerdekaan. Ini terbukti dengan adanya Perjanjian Panglong yang berisi kesediaan etnis-etnis minoritas seperti Kachin, Chin, dan Shan yang

mendukung perjuangan AFPFL untuk mencapai kemerdekaan. Selain itu, AFPFL juga merupakan satu-satunya organisasi yang berhasil menyatukan berbagai organisasi seperti BRP, ABYL, dan PRP untuk melawan pemerintahan pendudukan Jepang.

Sebagai gambaran umum, setelah Burma benar-benar merdeka, AFPFL menjadi sebuah partai politik yang berpengaruh besar dalam politik dan pemerintahan Burma. Namun, setelah kudeta yang dilakukan oleh Ne Win pada tahun 1962, AFPFL dibubarkan. Ne Win menerapkan sistem satu partai atau *one party system*. Partai yang kemudian berkuasa adalah *Burma Socialist Program Party* (BSPP). Walaupun begitu, sejarah perjuangan AFPFL dalam memperjuangkan kemerdekaan Burma tidak hilang begitu saja. AFPFL tetap menjadi organisasi yang penting dalam historiografi perjuangan kemerdekaan Burma.